JGSP
Jurnal Greenation Sosial dan Politik
+62 81210467572 https://greenationpublisher.org/JGSP greenation.info@gmail.com
GREENATION PUBLISHER

DOI: https://doi.org/10.38035/jgsp.v4i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 11 November 2026 | **Revised:** 17 November 2026 | **Accepted:** 20 November 2026

Pengaruh Komunikasi Anggota DPRD Terhadap Penyerapan Aspirasi di Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli

Asriadi Umar Said[1], Muh Nawawi[2], Nur Alamsyah[3].
[1]Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Indonesia asriadiumarsaidsap@gmail.com
[2]Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Indonesia muh.nawawi@untad.ac.id
[3]Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Indonesia mnuralamsyahsip@gmail.com

Corresponding Author: asriadiumarsaidsap@gmail.com[1]

Abstract: *Public aspiration absorption is an important function of members of the Regional House of Representatives in fulfilling their representative role. However, communication during recess activities does not necessarily ensure that public aspirations are adequately accommodated. Previous studies have mainly discussed recess implementation and political communication strategies, while quantitative research examining the influence of communication elements on public aspiration absorption in coastal areas remains limited. This study aims to determine the effect of communication by members of the Regional House of Representatives on public aspiration absorption in North Dampal District, Tolitoli Regency. The study employed a quantitative survey involving 99 eligible voters. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression. The findings indicate that communication received a rating of 81 percent, while public aspiration absorption reached 69 percent. However, communication did not have a statistically significant simultaneous effect on public aspiration absorption, with a significance value of 0.118 and a coefficient of determination of 8.9 percent. The novelty of this study lies in providing empirical evidence of the gap between relatively positive public assessments of communication and the less optimal absorption of public aspirations in a coastal area.*

Keyword: *Political Communication; Legislators; Recess; Public Aspirations; Coastal Areas.*

Abstrak: Penyerapan aspirasi masyarakat merupakan salah satu fungsi penting anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan peran representasi. Namun, pelaksanaan komunikasi dalam kegiatan reses belum tentu menjamin aspirasi masyarakat dapat terserap secara optimal. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas pelaksanaan reses dan strategi komunikasi politik, sedangkan kajian kuantitatif mengenai pengaruh unsur-unsur komunikasi terhadap penyerapan aspirasi masyarakat di wilayah pesisir masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komunikasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap penyerapan aspirasi masyarakat di Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 99 responden yang memenuhi kriteria pemilih. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi memperoleh penilaian sebesar 81 persen, sedangkan penyerapan aspirasi mencapai 69 persen.

Namun, secara simultan komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan aspirasi masyarakat, dengan nilai signifikansi 0,118 dan koefisien determinasi 8,9 persen. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyajian bukti empiris mengenai kesenjangan antara penilaian komunikasi yang relatif tinggi dan penyerapan aspirasi yang belum optimal dalam konteks wilayah pesisir.

Kata Kunci: Komunikasi Politik, Anggota Legislatif, Reses, Aspirasi Masyarakat, Wilayah Pesisir.

PENDAHULUAN

Dalam demokrasi perwakilan, hubungan antara wakil rakyat dan yang diwakilinya bertumpu pada komunikasi. DPRD sebagai lembaga perwakilan di daerah dituntut mengartikulasikan aspirasi rakyat, salah satunya melalui reses (Kurniasih & Rusfiana, 2021). Dalam menjaring aspirasi, anggota DPRD perlu menjalin komunikasi politik yang konsisten dengan konstituennya (Mugan & Sukmariningsih, 2022). Komunikasi politik menjadi elemen kunci pada setiap tahap proses legislasi, mulai dari penyaringan aspirasi hingga negosiasi kebijakan, dan keberhasilan legislator sangat dipengaruhi oleh kemampuannya membangun komunikasi yang efektif, responsif, dan partisipatif (Maulansyah, 2025).

Kewajiban tersebut memiliki dasar hukum yang tegas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 mewajibkan anggota DPRD menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sebagai bagian dari fungsi representasi. Hasil reses juga dapat menjadi bahan masukan penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Reses yang dilaksanakan tiga kali dalam setahun menjadi wadah menampung aspirasi pembangunan sekaligus memberi legitimasi pada kebijakan melalui konsultasi publik (Husein et al., 2024). Pada praktiknya, efektivitas reses tidak selalu terjamin. Penggunaan dana reses di Kota Pekanbaru, misalnya, dinilai belum efektif karena sebagian kriteria efektivitas belum terpenuhi (Azzahri et al., 2021), dan di Kota Medan aspirasi belum sepenuhnya terwujud meskipun anggota dewan telah mengembangkan strategi komunikasi sendiri (Zebua et al., 2026).

Dalam penelitian ini, komunikasi anggota DPRD ditinjau melalui lima unsur komunikasi Lasswell, yaitu pengirim pesan, pesan, saluran, penerima pesan, dan efek yang dioperasionalkan sebagai umpan balik. Integrasi kelima unsur tersebut berkontribusi pada kualitas komunikasi publik (Wahyuni et al., 2026). Penyerapan aspirasi masyarakat dimaknai sebagai rangkaian penghimpunan, pengidentifikasian, penyaluran, dan tindak lanjut aspirasi. Persoalan ini tampak di Kabupaten Tolitoli yang memiliki 30 anggota DPRD dari 11 partai politik pada empat daerah pemilihan, dengan 10 kecamatan dan 236.021 penduduk (Badan Pusat Statistik [BPS] Kabupaten Tolitoli, 2026). Kecamatan Dampal Utara berada di Dapil IV, memiliki 12 desa dan 14,10 ribu penduduk, sepuluh desa di antaranya berada di tepi laut, serta berjarak 149 km dari ibu kota kabupaten, terjauh kedua dari 10 kecamatan (BPS Kabupaten Tolitoli, 2026). Kecamatan ini tidak memiliki rumah sakit, klinik, maupun apotek, hanya memiliki dua tenaga medis, dan sekolah menengah pertama hanya tersedia di 5 dari 12 desa; berdasarkan Indeks Desa Membangun, kecamatan ini belum memiliki desa mandiri dan masih memiliki satu desa tertinggal (BPS Kabupaten Tolitoli, 2025). Kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi masih besar, dan hanya dapat masuk ke dalam kebijakan daerah apabila aspirasinya terserap oleh DPRD. Jarak dan kondisi geografis membuat pertemuan langsung dengan wakil rakyat tidak mudah, sehingga jangkauan komunikasi menjadi penentu.

Data Sekretariat DPRD Kabupaten Tolitoli (2026) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2026 reses di Kecamatan Dampal Utara hanya terlaksana empat kali oleh empat anggota DPRD dalam dua masa reses, masing-masing berlangsung dua hari berturut-turut, yaitu 8–9 Januari dan 18–19 Mei 2026. Kegiatan tersebut hanya berlokasi di tiga desa, yakni Malambigu, Ogotua, dan Sese, sehingga sembilan dari 12 desa tidak tercatat sebagai lokasi reses. Penyampaian pesan cenderung terjadi pada momentum tertentu, didominasi komunikasi satu arah, dan aspirasi yang disampaikan sering kali tidak diikuti informasi yang jelas tentang tindak lanjutnya. Fenomena ini mengindikasikan bahwa komunikasi anggota DPRD belum menjangkau masyarakat secara merata dan berkelanjutan, sehingga penyerapan aspirasi berpotensi tidak optimal dan fungsi representasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kajian terdahulu telah menelaah komunikasi dalam penyerapan aspirasi dari berbagai sudut. Malik (2021) mengkaji komunikasi politik pada masa reses di Kota Tasikmalaya, Holilah dan Ismail (2023) mengkaji model komunikasi reses di Kabupaten Bangkalan berdasarkan latar belakang pendidikan anggota DPRD, Mawaddah et al. (2024) menunjukkan bahwa upaya DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat membangun partisipasi melalui penyerapan aspirasi telah berjalan lewat reses dan kunjungan kerja, dan Gazali et al. (2025) menelaah efektivitas kebijakan reses di Provinsi Jawa Timur. Dari sisi saluran, Yasin et al. (2023) mengkaji penggunaan aplikasi e-reses di Kabupaten Bima, sedangkan Zebua et al. (2026) menegaskan pentingnya strategi komunikasi yang memadukan pendekatan langsung dan digital. Pada masa pandemi Covid-19, Rezkiawan et al. (2022) menemukan bahwa penyampaian pesan anggota DPRD Kabupaten Sinjai tetap berjalan efektif meskipun terkendala terbatasnya ruang berkumpul dan ketidakpuasan sebagian warga atas tindak lanjut aspirasi.

Kajian-kajian tersebut, terutama yang dilakukan Rezkiawan et al. (2022), Maulansyah (2025), dan Zebua et al. (2026), menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menggambarkan strategi dan proses komunikasi, tetapi belum menjelaskan seberapa besar pengaruh kualitas komunikasi anggota DPRD terhadap penyerapan aspirasi. Selain itu, belum ada kajian yang menguji pengaruh tersebut pada wilayah pesisir dan kepulauan dengan keterbatasan jarak dan layanan dasar seperti Kecamatan Dampal Utara. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian pengaruh komunikasi anggota DPRD yang diukur melalui lima unsur Lasswell terhadap penyerapan aspirasi masyarakat dengan pendekatan kuantitatif, pada konteks DPRD periode 2024–2029 dan dengan data jangkauan reses tahun 2026 sebagai pijakan empiris.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini menjawab pertanyaan: bagaimana pengaruh komunikasi anggota DPRD terhadap penyerapan aspirasi masyarakat di Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli? Sejalan dengan pertanyaan itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh komunikasi anggota DPRD terhadap penyerapan aspirasi masyarakat di Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli.

METODE

Metode Penelitian

Sugiyono, (2018:2), menjelaskan bahwa metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif dalam melakukan penelitiannya. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atas sample tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei eksplanatori untuk menguji pengaruh komunikasi anggota DPRD (X) terhadap penyerapan aspirasi masyarakat (Y). Pendekatan kuantitatif dipilih karena data berbentuk angka yang diperoleh melalui kuesioner dan dianalisis secara statistik. Objek penelitian adalah komunikasi anggota

DPRD dan penyerapan aspirasi masyarakat di Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli. Penelitian dilakukan melalui enam langkah, yaitu pembatasan dan perumusan masalah, penetapan landasan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Hipotesis yang diuji adalah komunikasi anggota DPRD berpengaruh positif terhadap penyerapan aspirasi masyarakat.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tahun 2026 di Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli. Lokasi ini dipilih karena merupakan konstituen Dapil IV yang memiliki 12 desa dengan jangkauan reses terbatas sebagaimana diuraikan pada bagian pendahuluan. Data primer dikumpulkan langsung dari responden di kecamatan tersebut.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat Kecamatan Dampal Utara yang telah memiliki hak pilih. Kelompok ini dipilih karena merupakan konstituen yang menjadi sasaran penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD sehingga paling relevan menilai komunikasi mereka. Jumlah pemilih di Kecamatan Dampal Utara tercatat 11.594 orang, terdiri atas 5.967 laki-laki dan 5.627 perempuan (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, 2026).

Sampel diambil dengan probability sampling melalui teknik simple random sampling, sehingga setiap pemilih memiliki peluang yang sama untuk menjadi responden. Ukuran sampel dihitung dengan rumus Slovin, $n = N / (1 + Ne^2)$, dengan N sebesar 11.594 dan batas toleransi kesalahan (e) 10% karena populasi relatif besar. Perhitungannya adalah $n = 11.594 / (1 + 11.594 \times 0,01) = 11.594 / 116,94 = 99,15$, yang dibulatkan menjadi 99 responden.

Instrumen dan Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan kuesioner tertutup berskala Likert lima tingkat, yaitu sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), ragu-ragu (3), setuju (4), dan sangat setuju (5). Data bersifat primer dan cross-sectional, yakni dikumpulkan satu kali dari responden pada satu periode. Kuesioner terdiri atas 18 pernyataan. Variabel komunikasi anggota DPRD (X) diukur dengan 10 pernyataan pada lima dimensi, yaitu pengirim pesan (X1), pesan (X2), saluran atau media (X3), penerima pesan (X4), dan efek atau umpan balik (X5), masing-masing dengan dua indikator. Variabel penyerapan aspirasi masyarakat (Y) diukur dengan delapan pernyataan pada empat dimensi, yaitu struktur artikulasi kepentingan (Y1), saluran penyampaian tuntutan (Y2), gaya artikulasi kepentingan (Y3), dan pengaruh modernisasi terhadap artikulasi (Y4), masing-masing dengan dua indikator. Contoh pernyataan pada X1 adalah "Anggota DPRD menyampaikan informasi kepada masyarakat Kecamatan Dampal Utara secara jelas", dan pada Y2 adalah "Masyarakat Kecamatan Dampal Utara dapat menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD melalui kegiatan reses".

Teknik Analisis Data

Data diolah dengan IBM SPSS Statistics versi 26. Analisis diawali dengan statistik deskriptif yang meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi untuk menggambarkan jawaban responden pada setiap variabel. Instrumen kemudian diuji validitasnya dengan membandingkan r hitung dan r tabel, dan dinyatakan valid apabila r hitung lebih besar daripada r tabel. Reliabilitas diuji dengan koefisien Cronbach's alpha, dan instrumen dinyatakan reliabel apabila nilainya lebih besar dari 0,6.

Sebelum regresi, dilakukan uji asumsi klasik. Normalitas residual diuji dengan Kolmogorov-Smirnov (data normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05). Multikolinearitas dideteksi melalui nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF), dengan model bebas multikolinearitas jika tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Heteroskedastisitas diuji dengan uji Glejser, dengan model bebas heteroskedastisitas jika

signifikansi lebih besar dari 0,05. Linearitas diuji melalui baris deviation from linearity, dengan hubungan dinyatakan linear jika signifikansi lebih besar dari 0,05.

Pengaruh komunikasi anggota DPRD terhadap penyerapan aspirasi diuji dengan regresi linear berganda dengan persamaan $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$, dengan a sebagai konstanta, b sebagai koefisien regresi, dan e sebagai galat. Uji F dengan taraf signifikansi 5% digunakan untuk menguji pengaruh simultan, dengan H_0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel atau signifikansi kurang dari 0,05. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh parsial setiap dimensi dengan hipotesis H_0: $\beta \leq 0$ dan H_1: $\beta > 0$, dan H_0 ditolak jika t hitung lebih besar dari t tabel atau signifikansi kurang dari 0,05. Kemampuan model menjelaskan variasi penyerapan aspirasi dinilai dengan koefisien determinasi ($KD = R^2 \times 100\%$) dan adjusted R square. Kekuatan hubungan yang ditunjukkan nilai R ditafsirkan sebagai berikut: 0,00–0,199 sangat rendah, 0,20–0,399 rendah, 0,40–0,599 sedang, 0,60–0,799 kuat, dan 0,80–1,000 sangat kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Karakteristik Responden dan Gambaran Data Penelitian

Data diperoleh dari 99 responden yang memiliki hak pilih di Kecamatan Dampal Utara, dikumpulkan secara luring dan melalui Google Form. Responden laki-laki sebanyak 51 orang (51,52%) dan perempuan 48 orang (48,48%). Menurut usia, kelompok terbesar adalah 20–30 tahun (34,34%), disusul 31–40 tahun (27,27%), lebih dari 41 tahun (21,21%), dan kurang dari 20 tahun (17,17%). Sebaran ini menunjukkan responden cukup beragam dari segi jenis kelamin dan usia.

Tabel 1. Statistik Deskriptif (N = 99)

Variabel/Dimensi	Min	Maks	Rata-rata	Std. Deviasi
Pengirim Pesan (X1)	6	10	8,2424	0,809
Pesan (X2)	6	10	8,0808	0,583
Saluran (X3)	7	10	8,1212	0,760
Penerima Pesan (X4)	7	10	8,0909	0,671
Umpan Balik (X5)	6	10	8,1515	0,787
Komunikasi Anggota DPRD (X)	34	44	40,69	1,978
Struktur Artikulasi Kepentingan (Y1)	5	8	6,9697	0,863
Saluran Penyampaian Tuntutan (Y2)	5	8	6,8586	0,808
Gaya Artikulasi Kepentingan (Y3)	5	8	6,9091	0,744
Pengaruh Modernisasi terhadap Artikulasi (Y4)	5	8	6,8182	0,800
Penyerapan Aspirasi (Y)	22	31	27,56	1,704

Sumber: data primer diolah, 2026

Skor komunikasi anggota DPRD rata-rata 40,69 dari skor maksimum teoretis 50 (sekitar 81%), sedangkan skor penyerapan aspirasi rata-rata 27,56 dari maksimum 40 (sekitar 69%). Responden menilai komunikasi anggota DPRD lebih tinggi daripada penyerapan aspirasinya. Kelima dimensi komunikasi dinilai pada tingkat yang hampir sama (8,08–8,24; selisih 0,16), demikian pula keempat dimensi penyerapan aspirasi (6,82–6,97; selisih 0,15). Sebaran jawaban sempit pada kedua variabel, ditunjukkan koefisien variasi sekitar 4,9% untuk X dan 6,2% untuk Y. Artinya, penilaian responden cenderung seragam.

Kualitas Instrumen dan Uji Asumsi Klasik

Tabel 2. Ringkasan Uji Instrumen dan Asumsi Klasik

Pengujian	Hasil	Kriteria	Kesimpulan
Validitas (r hitung)	X1–X5: 0,429–0,650; Y1–Y4: 0,470–0,584	> 0,198 (n = 99)	Seluruh butir valid
Reliabilitas (Cronbach's alpha)	X = 0,405; Y = 0,143	> 0,60	Belum memenuhi kriteria
Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)	Sig. 0,200	> 0,05	Residual normal
Heteroskedastisitas (Glejser)	Sig. 0,274–0,932	> 0,05	Tidak terjadi
Linearitas (deviation from linearity)	Sig. 0,098–0,989	> 0,05	Linear
Multikolinearitas	Tolerance 0,850–0,993; VIF 1,008–1,176	Tol. > 0,10; VIF < 10	Tidak terjadi

Sumber: data primer diolah, 2026

Seluruh butir pernyataan valid, dan seluruh asumsi klasik terpenuhi sehingga model layak dianalisis dengan regresi linear berganda. Namun, nilai Cronbach's alpha kedua variabel (0,405 dan 0,143) berada di bawah batas 0,60, sehingga konsistensi internal instrumen tergolong rendah. Hal ini perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil dan dicatat sebagai keterbatasan penelitian.

Pengaruh Komunikasi Anggota DPRD terhadap Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Pengaruh kelima dimensi komunikasi anggota DPRD terhadap penyerapan aspirasi diuji dengan regresi linear berganda. Hasilnya disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4

Tabel 3. Hasil Regresi Linear Berganda (variabel terikat: Penyerapan Aspirasi)

Variabel	**Koefisien (B)**	**t hitung**	**Sig.**	**Keputusan**
Konstanta	18,592	–	–	–
Pengirim Pesan (X1)	0,420	1,897	0,061	Tidak signifikan
Pesan (X2)	0,414	1,343	0,182	Tidak signifikan
Saluran (X3)	0,025	0,102	0,919	Tidak signifikan
Penerima Pesan (X4)	0,234	0,928	0,356	Tidak signifikan
Umpan Balik (X5)	0,007	0,035	0,972	Tidak signifikan

Sumber: data primer diolah, 2026. t tabel = 1,986 ($\alpha = 0,05$; df = 93).

Persamaan regresinya adalah $Y = 18,592 + 0,420X_1 + 0,414X_2 + 0,025X_3 + 0,234X_4 + 0,007X_5 + e$. Seluruh koefisien bertanda positif, searah dengan hipotesis penelitian. Namun, tidak ada satu pun koefisien yang signifikan. Seluruh t hitung (0,035–1,897) lebih kecil daripada t tabel 1,986, dan seluruh nilai Sig. (0,061–0,972) lebih besar dari 0,05. Pengirim Pesan paling mendekati batas signifikansi, sedangkan Saluran dan Umpan Balik hampir tidak memberi kontribusi karena koefisiennya mendekati nol.

Tabel 4. Ringkasan Uji F dan Koefisien Determinasi

Statistik	**Nilai**	**Kriteria**	**Kesimpulan**
F hitung	1,813	F tabel 2,312 (df 5; 93)	F hitung < F tabel
Sig. F	0,118	< 0,05	Tidak signifikan
R	0,298	0,20–0,399 = rendah	Hubungan rendah
R^2	0,089	KD = 8,9%	Daya jelas sangat kecil
Adjusted R^2	0,040	–	4,0%

Sumber: data primer diolah, 2026

Secara simultan, kelima dimensi komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan aspirasi (F hitung 1,813 < F tabel 2,312; Sig. 0,118 > 0,05). Nilai R sebesar 0,298 menunjukkan hubungan yang tergolong rendah. Nilai R^2 sebesar 0,089 berarti komunikasi hanya menjelaskan 8,9% variasi penyerapan aspirasi, dan setelah disesuaikan dengan jumlah variabel bebas turun menjadi 4,0%. Sebanyak 91,1% variasi lainnya berkaitan dengan faktor di luar model. Dengan demikian, hipotesis bahwa komunikasi anggota DPRD berpengaruh positif terhadap penyerapan aspirasi masyarakat tidak terbukti (H_1 ditolak, H_0 diterima). Jawaban atas pertanyaan penelitian adalah bahwa pengaruh komunikasi anggota DPRD terhadap penyerapan aspirasi di Kecamatan Dampal Utara lemah dan tidak signifikan, baik secara simultan maupun parsial.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi anggota DPRD yang dinilai cukup tinggi oleh masyarakat tidak secara otomatis menghasilkan penyerapan aspirasi yang optimal. Hal ini disebabkan karena penyerapan aspirasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian dan penerimaan pesan, tetapi juga mencakup proses pengidentifikasian, penyaluran, serta tindak lanjut aspirasi ke dalam kebijakan pembangunan. Hofstra dan Edelenbos (2025) menjelaskan bahwa responsivitas pemerintah terhadap partisipasi masyarakat ditentukan oleh kemampuan lembaga pemerintahan dalam mendengarkan, mengolah, dan memberikan tanggapan terhadap masukan masyarakat secara tepat. Dengan demikian, komunikasi yang baik perlu didukung oleh mekanisme kelembagaan yang mampu memastikan bahwa aspirasi masyarakat benar-benar diproses dan ditindaklanjuti.

Temuan ini menarik karena responden sebenarnya menilai komunikasi anggota DPRD cukup tinggi (sekitar 81% dari skor maksimum), lebih tinggi daripada penilaian atas penyerapan aspirasi (sekitar 69%). Komunikasi yang dinilai baik tidak otomatis membuat aspirasi terserap. Penyerapan aspirasi tidak berhenti pada penghimpunan, tetapi juga mencakup pengidentifikasian, penyaluran, dan tindak lanjut. Unsur komunikasi Lasswell terutama bekerja pada tahap awal, sedangkan tahap selanjutnya bergantung pada proses kelembagaan. Hasil reses baru menjadi bahan penyusunan rencana pembangunan daerah melalui mekanisme yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Karena itu, nasib aspirasi kemungkinan juga ditentukan oleh ketersediaan anggaran daerah, kewenangan dan kapasitas pemerintah daerah, serta perencanaan pembangunan, yaitu faktor yang tidak diukur dalam penelitian ini dan dapat menjadi bagian dari 91,1% variasi yang belum terjelaskan.

Kondisi lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan reses di Kecamatan Dampal Utara belum menjangkau seluruh desa secara merata. Sepanjang tahun 2026, kegiatan reses hanya terlaksana empat kali oleh empat anggota DPRD di tiga dari 12 desa, serta cenderung berlangsung satu arah dan belum disertai informasi tindak lanjut aspirasi yang jelas (Sekretariat DPRD Kabupaten Tolitoli, 2026). Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Lubis et al. (2025) yang menjelaskan bahwa anggota legislatif memiliki peran sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga pemerintahan melalui komunikasi formal maupun informal. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran dan ketimpangan partisipasi masyarakat menjadi tantangan dalam mewujudkan pembangunan partisipatif. Meskipun demikian, data jangkauan reses tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa aspirasi masyarakat dari desa lain tidak terserap, karena masyarakat masih dapat menyampaikan aspirasinya melalui saluran komunikasi lainnya.

Di antara kelima dimensi komunikasi, pengirim pesan menunjukkan nilai koefisien paling tinggi (B = 0,420; Sig. = 0,061), disusul dimensi pesan (B = 0,414). Temuan ini mengindikasikan bahwa kemampuan anggota DPRD sebagai komunikator dan kejelasan pesan memiliki kecenderungan hubungan yang lebih kuat dengan penyerapan aspirasi dibandingkan dimensi lainnya. Namun, kecenderungan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai pengaruh yang signifikan secara statistik. Sebaliknya, dimensi saluran (B = 0,025) dan umpan balik (B

= 0,007) menunjukkan koefisien yang sangat kecil. Azzaenuri et al. (2024) menekankan pentingnya komunikasi kolaboratif dan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD.

Hasil penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan Ananta dan Pinem (2026), yang menemukan bahwa komunikasi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat di Kota Medan, dengan koefisien regresi sebesar 0,634 dan nilai koefisien determinasi sebesar 37,95%. Perbedaan hasil tersebut dapat dipahami karena variabel terikat yang digunakan berbeda. Penelitian Ananta dan Pinem berfokus pada partisipasi politik dalam pemilihan gubernur, sedangkan penelitian ini berfokus pada penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD. Sementara itu, Lubis et al. (2025) menunjukkan bahwa komunikasi anggota legislatif dapat berperan sebagai penghubung aspirasi masyarakat dengan lembaga pemerintahan, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran dan ketimpangan partisipasi. Anggun et al. (2026) juga menjelaskan bahwa penyerapan aspirasi memerlukan strategi komunikasi yang memadukan saluran formal dan informal. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyerapan aspirasi tidak hanya bergantung pada kualitas komunikasi, tetapi juga dipengaruhi oleh jangkauan komunikasi, kondisi kelembagaan, dan mekanisme tindak lanjut aspirasi.

Secara praktis, peningkatan kualitas komunikasi saja belum cukup. Anggota DPRD perlu memperluas jangkauan reses ke seluruh desa, menyediakan mekanisme tindak lanjut yang jelas, dan menyampaikan perkembangannya kepada masyarakat. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Reliabilitas instrumen belum memenuhi kriteria, data bersifat persepsi dan cross-sectional, responden dikumpulkan secara luring dan melalui Google Form, serta cakupan penelitian terbatas pada satu kecamatan. Instrumen tidak mencatat desa asal atau keikutsertaan responden dalam reses, sehingga pengaruh jangkauan reses belum dapat diuji. Penelitian selanjutnya disarankan memperbaiki instrumen, memasukkan variabel anggaran, kapasitas pemerintah daerah, dan tindak lanjut aspirasi, serta memadukan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif.

Temuan penelitian ini (novelty) adalah bukti kuantitatif pertama dari wilayah pesisir dan kepulauan dengan keterbatasan jarak dan layanan dasar, yaitu Kecamatan Dampal Utara, bahwa komunikasi anggota DPRD yang diukur melalui lima unsur Lasswell tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan aspirasi masyarakat (F hitung 1,813; Sig. 0,118; R^2 = 8,9%), padahal komunikasi tersebut dinilai tinggi oleh responden (sekitar 81% dari skor maksimum). Temuan ini berbeda dari penelitian terdahulu yang melaporkan pengaruh komunikasi yang signifikan, dan menggeser fokus dari kualitas komunikasi semata ke jangkauan reses dan tindak lanjut aspirasi. Komunikasi yang baik belum cukup menjamin terserapnya aspirasi. Selain itu, di antara lima unsur komunikasi, peran pengirim pesan menunjukkan kecenderungan paling kuat, sehingga dapat menjadi titik awal bagi penelitian lanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh komunikasi anggota DPRD terhadap penyerapan aspirasi masyarakat di Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, dapat disimpulkan bahwa komunikasi anggota DPRD belum terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan aspirasi masyarakat. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan nilai F hitung sebesar 1,813 dengan signifikansi 0,118, lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Secara parsial, kelima dimensi komunikasi yang meliputi pengirim pesan, pesan, saluran, penerima pesan, dan umpan balik juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Nilai koefisien determinasi sebesar 8,9% menunjukkan bahwa kemampuan kelima dimensi komunikasi dalam menjelaskan variasi penyerapan aspirasi masyarakat masih terbatas.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tingginya penilaian masyarakat terhadap komunikasi anggota DPRD belum sepenuhnya diikuti oleh optimalnya penyerapan aspirasi.

Dengan demikian, komunikasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyampaian pesan dan kegiatan penjaringan aspirasi, tetapi perlu didukung oleh pemerataan jangkauan komunikasi, mekanisme penyaluran, serta tindak lanjut aspirasi secara jelas dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan gambaran empiris bahwa penguatan fungsi representasi DPRD, khususnya pada wilayah dengan keterbatasan geografis dan layanan dasar seperti Kecamatan Dampal Utara, memerlukan perhatian tidak hanya pada kualitas komunikasi, tetapi juga pada proses kelembagaan yang menjamin aspirasi masyarakat dapat diproses menjadi bahan pertimbangan pembangunan daerah.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Pertama, penelitian hanya dilakukan di Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, dengan jumlah responden sebanyak 99 orang, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk menggambarkan kondisi penyerapan aspirasi masyarakat di wilayah lain. Kedua, instrumen penelitian memiliki nilai Cronbach's alpha sebesar 0,405 pada variabel komunikasi anggota DPRD dan 0,143 pada variabel penyerapan aspirasi masyarakat. Nilai tersebut belum memenuhi kriteria reliabilitas yang ditetapkan, sehingga konsistensi internal instrumen masih rendah dan dapat memengaruhi ketepatan pengukuran variabel.

Ketiga, penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data cross-sectional yang dikumpulkan melalui kuesioner dalam satu periode, sehingga belum mampu menggambarkan perubahan komunikasi dan proses penyerapan aspirasi dalam jangka panjang. Keempat, model penelitian hanya menguji lima dimensi komunikasi berdasarkan unsur Lasswell, sedangkan masih terdapat faktor lain yang berpotensi berkaitan dengan penyerapan aspirasi, seperti ketersediaan anggaran, kapasitas kelembagaan, kewenangan pemerintah daerah, pemerataan pelaksanaan reses, dan tindak lanjut aspirasi. Selain itu, instrumen penelitian belum secara khusus mengidentifikasi desa asal responden dan pengalaman mereka mengikuti kegiatan reses, sehingga hubungan antara jangkauan reses dan penyerapan aspirasi belum dapat dianalisis secara mendalam.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ditemukan, anggota DPRD Kabupaten Tolitoli disarankan untuk meningkatkan pemerataan jangkauan komunikasi dengan masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Dampal Utara yang memiliki kondisi geografis dan jarak antardesa yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan komunikasi langsung. Kegiatan reses perlu dilaksanakan dengan memperhatikan keterwakilan seluruh desa, disertai mekanisme pencatatan, pengelompokan, dan penyampaian perkembangan tindak lanjut aspirasi kepada masyarakat. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antara anggota DPRD, pemerintah daerah, dan perangkat desa agar aspirasi yang telah dihimpun dapat dipertimbangkan dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah.

Bagi pemerintah daerah dan Sekretariat DPRD, disarankan untuk mengembangkan sistem dokumentasi dan pemantauan aspirasi masyarakat yang lebih transparan sehingga masyarakat dapat mengetahui status dan perkembangan aspirasi yang telah disampaikan. Upaya tersebut perlu didukung dengan penyediaan saluran komunikasi yang mudah dijangkau, baik melalui pertemuan langsung maupun media digital, tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan jumlah responden serta memperbaiki instrumen penelitian agar memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas yang lebih baik. Penelitian berikutnya juga dapat menambahkan variabel lain, seperti jangkauan reses, kapasitas kelembagaan, ketersediaan anggaran, partisipasi masyarakat, dan tindak lanjut aspirasi. Penggunaan pendekatan campuran (mixed methods) atau penelitian

longitudinal juga dapat dipertimbangkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara komunikasi anggota DPRD dan proses penyerapan aspirasi masyarakat dari waktu ke waktu.

Kontribusi Penulis

Seluruh penulis berkontribusi secara signifikan terhadap penelitian ini. Kontribusi meliputi konseptualisasi penelitian, penyusunan kerangka teori, pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil, penulisan naskah, revisi ilmiah, serta persetujuan akhir terhadap naskah yang akan dipublikasikan. Seluruh penulis menyatakan telah membaca dan menyetujui versi final artikel.

Pernyataan Pengungkapan AI

Selama penyusunan naskah penelitian ini, penulis menggunakan Claude AI dan ChatGPT sebagai alat bantu dalam proses penyuntingan tata bahasa, perbaikan struktur kalimat, penyempurnaan penulisan akademik, serta pengembangan redaksi. Penulis telah meninjau, memeriksa, dan merevisi seluruh isi naskah secara menyeluruh. Penulis bertanggung jawab penuh atas keakuratan data, analisis, interpretasi hasil, dan seluruh isi publikasi dalam naskah penelitian ini.

Pengakuan (Opsional)

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi selama proses pelaksanaan penelitian hingga penyusunan naskah ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada masyarakat Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, yang telah bersedia menjadi responden dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penelitian ini.

REFERENSI

Anggun, D., Sadono, T. P., & Pramono, B. S. (2026). Political communication strategies of DPRD members in absorbing public aspirations: A case study of Jombang Regency period 2024–2029. Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research, 5(1), 283–306. https://doi.org/10.55927/modern.v5i1.24

Ananta, S., & Pinem, W. (2026). Pengaruh komunikasi politik terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2024 di Kota Medan. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 11(1). https://doi.org/10.23969/jp.v11i01.42317

Azzaenuri, L. A., Rochayanti, C., & Suparno, B. A. (2024). Enhancing collaborative communication strategies with members of the Regional Representatives Council (DPRD) in Yogyakarta. Profetik: Jurnal Komunikasi, 17(2), 246–268. https://doi.org/10.14421/pjk.v17i2.3172

Azzahri, R., Andri, S., & Adianto. (2021). Efektivitas penggunaan dana reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dalam menyerap aspirasi masyarakat. Jurnal Niara, 14(1), 266–275. https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.5133

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolitoli. (2025). Kecamatan Dampal Utara dalam angka 2025. BPS Kabupaten Tolitoli.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolitoli. (2026). Kabupaten Tolitoli dalam angka 2026. BPS Kabupaten Tolitoli.

Gazali, F. N., Kamariyah, S., Pramudiana, I. D., & Dwijosusilo, K. (2025). Efektivitas kebijakan pelaksanaan kegiatan reses anggota dewan dalam menampung aspirasi masyarakat di Provinsi Jawa Timur. WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 3(1), 375–388. https://doi.org/10.62383/wissen.v3i1.671

Hofstra, R., & Edelenbos, J. (2025). What to do with the outputs from public participation? Conceptualising and explaining responsiveness of civil servants. Local Government Studies. https://doi.org/10.1080/03003930.2025.2459417

Holilah, H., & Ismail, M. (2023). Model komunikasi reses anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Bangkalan (Studi berdasarkan latar belakang pendidikan anggota DPRD). Indonesian Journal of Political Studies, 3(2), 150–175. https://doi.org/10.15642/ijps.2023.3.2.150-175

Husein, M., Suryaningsih, Pratidina, G., & Seran, G. G. (2024). Efektivitas kebijakan penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses. Karimah Tauhid, 3(1), 539–548. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i1.11674

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli. (2026). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 08 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Tolitoli Triwulan II Tahun 2026. KPU Kabupaten Tolitoli.

Kurniasih, D., & Rusfiana, Y. (2021). Fungsi reses anggota DPRD dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat Kabupaten Bandung. Jurnal Academia Praja, 4(2), 380–395. https://doi.org/10.36859/jap.v4i2.663

Lubis, M. A. R., Sihombing, M., Humaizi, & Ridho, H. (2025). Legislators as bridges of democracy: Communication, constituency, and participatory development in Medan city council. Research Journal in Advanced Humanities, 6(4). https://doi.org/10.58256/34mvfk06

Malik, R. A. (2021). Komunikasi politik (Studi kegiatan masa reses anggota DPRD Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Kota Tasikmalaya periode 2014–2019). Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 7(1), 14–28. https://doi.org/10.37058/jipp.v7i1.2618

Maulansyah, D. M. (2025). Strategi komunikasi politik pimpinan Komisi I DPRD Sumedang dalam optimalisasi fungsi legislatif dan representasi aspiratif. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(2), 17011–17017. https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.28523

Mawaddah, I., Risnain, M., & Amalia, R. A. (2024). Peran DPRD Provinsi NTB dalam menanggapi serta melaksanakan aspirasi dan partisipasi masyarakat. Jurnal Diskresi, 3(2), 120–125. https://doi.org/10.29303/diskresi.v3i2.6020

Mugan, M., & Sukmariningsih, R. M. (2022). Kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan aspirasi anggota DPRD. Hukum dan Masyarakat Madani, 12(2), 369–379. https://doi.org/10.26623/humani.v12i2.5522

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rezkiawan, A., Yahya, M., & Rina, D. (2022). Komunikasi politik anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi rakyat di masa pandemi Covid-19. Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, 13(2), 200–213. https://doi.org/10.26618/176fkw38

Sekretariat DPRD Kabupaten Tolitoli. (2026). Data pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Tolitoli tahun 2026 [Data tidak dipublikasikan].

Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wahyuni, S. P., Suryani, I., & Sofiawati, S. (2026). Dampak komunikasi pelayanan publik Polsek Jatisampurna dalam membangun kepuasan masyarakat: Analisis model komunikasi Harold Lasswell. Janaloka: Jurnal Ilmu Komunikasi, 4(1), 379–388. https://doi.org/10.26623/janaloka.v4i1.14905

Yasin, Y., Saleh, M., & Mulyanto, Y. (2023). Penggunaan aplikasi e-reses DPRD dalam penjaringan aspirasi masyarakat di Kabupaten Bima. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(2), 1108–1115. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i2.1464

Zebua, A., Hasibuan, S., Napitupulu, E. E., & Sembiring, L. G. A. B. (2026). Political communication strategies of Medan City DPRD members during recess in their electoral district in Labuhan, Medan. Journal Analytica Islamica, 15(2), 781–789. https://doi.org/10.30829/jai.v15i2.29283